

Analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat desa se-Kecamatan Alasa Talumuzoi dalam meningkatkan pelayanan publik

Yanta Firman Jaya Mendrofa, Delipiter Lase, Sukaaro Waruwu, Syah Abadi Mendrofa

Program Studi Manajemen, Universitas Nias

e-mail: yantamendrofa@gmail.com

ARTICLE INFO

Received: November 19, 2023

Revised: November 21, 2023

Accepted: November 22, 2023

Published: November 22, 2023

KEYWORDS

administrative and technological skills, community engagement, public service improvement, village bureaucracy, village officials training

ABSTRACT

This article aims to analyze the training and development needs of village officials in the Alasa Talumuzoi Sub-district to improve the quality of public services. This study used descriptive qualitative research methods to gather information from twelve village officials through semi-structured interviews. The results show significant variations in the knowledge and skills of village officials, with a primary focus on administrative skills, technology use, and communication improvement needs. Constraints identified included limited resources, limited access to technology, complex bureaucracy, social inequality, and low community participation and legal understanding. The training covers diverse aspects such as administrative management, law, finance, community development, and technology use. The implication is the need for training programs tailored to local conditions, improved access to technology, understanding of good governance, effective communication with communities, continuous evaluation, and community involvement in the development process. This study has limitations in accessing specific data and measuring the long-term impact of training and potential bias from respondents. However, the conclusions underscore the need for a holistic approach to improving village public services.

©2023 Authors. Published by PT Delada Cahayo Masagro

This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat desa di Kecamatan Alasa Talumuzoi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menggali informasi dari dua belas perangkat desa melalui wawancara semi terstruktur. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan perangkat desa, dengan fokus utama pada keterampilan administratif, penggunaan teknologi, dan kebutuhan peningkatan komunikasi. Kendala yang diidentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya, akses terbatas ke teknologi, birokrasi yang kompleks, ketidaksetaraan sosial, serta rendahnya partisipasi dan pemahaman hukum masyarakat. Pelatihan yang diperlukan mencakup beragam aspek seperti manajemen administrasi, hukum, keuangan, pengembangan masyarakat, dan penggunaan teknologi. Implikasinya adalah perlunya program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, peningkatan akses teknologi, pemahaman tata kelola yang baik, komunikasi efektif dengan masyarakat, evaluasi berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengakses data spesifik dan mengukur dampak jangka panjang pelatihan, serta potensi bias dari responden. Namun, kesimpulannya menggarisbawahi kebutuhan pendekatan holistik dalam peningkatan pelayanan publik di desa.

Kata kunci: birokrasi desa, keterampilan administratif dan teknologi, keterlibatan masyarakat, pelatihan perangkat desa, pelayanan publik

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, tuntutan terhadap efisiensi dan kualitas pelayanan publik menjadi semakin tinggi. Hal ini tidak terkecuali bagi desa-desa di berbagai wilayah, di mana pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu kunci penting dalam

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa banyak desa masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakatnya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di tingkat desa adalah kapasitas dan kompetensi perangkat desa itu sendiri. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh perangkat desa seringkali menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan dan pelayanan yang optimal. Selain itu, kendala seperti kurangnya akses terhadap sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial, juga turut berperan dalam membatasi kemampuan desa dalam mengelola dan menyediakan layanan publik yang memadai.

Pelatihan adalah proses belajar yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau kompetensi spesifik yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu (Dessler, 2020). Merupakan proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan (Handoko, 2017). Pelatihan biasanya lebih fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan pengetahuan yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas spesifik atau pekerjaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Sedangkan pengembangan, di sisi lain, merujuk pada proses belajar yang lebih luas dan jangka panjang, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan umum dan pengetahuan karyawan. Ini termasuk pengembangan keterampilan kepemimpinan, manajemen, dan keterampilan interpersonal, yang tidak hanya berguna untuk pekerjaan saat ini tetapi juga untuk peran di masa depan (Werner & DeSimone, 2012). Pengembangan lebih berorientasi pada pertumbuhan pribadi dan profesional secara menyeluruh (Lase, 2023; Waruwu et al., 2023).

Analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat desa dalam meningkatkan pelayanan publik adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Berbagai studi telah memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perangkat desa dalam konteks ini.

Hasil penelitian Saidi & Habibi (2022) yang dilakukan di Kantor Desa Kerta Buana menyoroti pentingnya motivasi dan pelatihan dari kepala desa dalam meningkatkan pendidikan dan pengetahuan perangkat desa. Sementara itu, Wijayanti & Taufik (2022) membahas peran penting dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menunjukkan keterkaitan langsung antara pengelolaan dana dan kualitas layanan publik. Prabawati et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya pengembangan manajemen data dan informasi di tingkat desa, menekankan peran teknologi informasi dalam memperkuat pelayanan publik. Oldy Arnoldy et al. (2021) memfokuskan pada motivasi pelayanan publik sebagai kunci untuk pembangunan desa, menyoroti bagaimana faktor internal dapat mempengaruhi penyampaian layanan. Dari perspektif hukum dan transparansi, Wicaksana et al. (2019) menekankan perlunya pelatihan dalam aspek-aspek ini untuk meningkatkan kualitas forum desa dan pengambilan keputusan. Ardiansyah et al. (2022) menunjukkan bagaimana pelatihan dan pengembangan berbasis teknologi, terutama melalui Sistem Informasi Desa (SID), dapat mempercepat penyediaan layanan desa.

Rasaili (2022) menyoroti pentingnya pelatihan dalam meningkatkan kompetensi perangkat desa, khususnya dalam manajemen keuangan desa. Siswanto et al. (2023) menekankan pentingnya kepemimpinan inovatif dan komitmen kepala desa dalam penyediaan layanan publik. Perlunya pelatihan khusus untuk memperbarui data sarana dan prasarana desa juga diungkapkan oleh Putra et al. (2023), sementara (Suharso et al., 2022) menyoroti pentingnya pelatihan dalam menggunakan sistem manajemen administrasi desa secara efektif.

Literatur-literatur di atas, menggarisbawahi pentingnya pelatihan dan pengembangan yang efektif bagi perangkat desa. Melalui pendekatan yang komprehensif, yang mencakup aspek hukum, teknologi, kepemimpinan, dan administrasi, perangkat desa dapat lebih efektif dalam memberikan layanan publik yang berkualitas tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan.

Mengingat pentingnya peran perangkat desa dalam sistem pelayanan publik, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi mereka. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang ada dan merancang program pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas serta keterampilan perangkat desa dalam mengelola dan menyediakan layanan publik. Dengan demikian, dapat diharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Pertimbangan untuk memilih pendekatan kualitatif adalah di antaranya penelitian hendak menyelami kedalaman kompleksitas dan proses; variabel terkait belum teridentifikasi (Marshall & Rossman, 2015, p. 46). Sumber data dan informan (partisipan) terdiri dari perangkat desa se-Kecamatan Alasa Talumuzoi berjumlah dua belas orang, ditetapkan dengan menggunakan teknik *purpose sampling*, yakni didasarkan atas kompetensi dan bukan atas dasar keterwakilan (Bernard, 2017). Data dijaring dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (Bernard, 2017). Analisis data dilakukan dengan *interactive model* yang dikembangkan oleh (Miles et al., 2014).

HASIL DAN DISKUSI

a. Profil Pengetahuan dan Keterampilan Perangkat Desa se-Kecamatan Alasa Talumuzoi

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden di desa-desa yang berbeda, terdapat beragam pandangan mengenai profil pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas mereka untuk meningkatkan pelayanan publik. Berikut ini adalah ringkasan dari wawancara dengan responden, yakni:

[#R¹: N. H, Sekretaris Desa Laehuwa], menekankan pentingnya pengetahuan hukum dan peraturan serta keterampilan administrasi, termasuk pengelolaan dokumen dan komunikasi dengan warga. [#R²: Y. Zebua – Desa Hilimbowo Kare] berfokus pada keterampilan administrasi dan pemanfaatan teknologi dalam pekerjaannya. Di sisi lain, [#R³: DM Zebua, warga Desa Laehuwa], mengkritik perangkat desa karena terlalu fokus pada administrasi dan kurang proaktif dalam memahami serta menangani kebutuhan warga. [#R⁴: S. Zebua – Desa Banua Sibohou III] menyatakan relevansi keterampilan operasional komputer dengan pekerjaannya. [#R⁵: A. K. Hulu, Kepala Desa Harefaanaese], menekankan perlunya perangkat desa memiliki keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

[#R⁶: J Zalukhu, Kaur Perencanaan di Desa Mazingo], menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan perangkat desa di Mazingo sejalan dengan pendidikan mereka dan kemajuan teknologi. [#R⁵] memuji profesionalisme perangkat desa di Kecamatan Alasa Talumuzoi dalam administrasi desa dan pelayanan publik. Namun, [#R⁷: DM Mendrofa, warga Desa Laehuwa] menganggap tidak semua perangkat desa di desanya profesional, dengan pelayanan publik yang seringkali kurang memuaskan. [#R⁸: AD Zebua dari Desa Hilimbowo Kare] menilai sebagian besar perangkat desa di desanya sebagai profesional dalam memberikan pelayanan publik. [#R⁹: H Zebua, warga Desa Banua Sibohou III], berpendapat bahwa sebagian perangkat desa memiliki profesionalisme yang baik, namun ada yang kurang efisien dan membutuhkan pelatihan tambahan. [#R¹⁰: F. Zebua dari Desa Hilina'a] mengkritik kurangnya profesionalisme perangkat desa, terutama dalam kedisiplinan waktu dan prioritas terhadap kepentingan pribadi. [#R¹¹: V. Zalukhu, warga Desa Mazingo], menganggap perangkat desa terlalu fokus pada administrasi dan kurang terlibat dalam kegiatan sosial dan adat, membuat warga merasa diabaikan.

Berdasarkan ringkasan hasil wawancara dengan berbagai responden di beberapa desa di atas, dapat disimpulkan bahwa profil pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas untuk meningkatkan pelayanan publik bervariasi antar individu dan desa. Kesimpulan utama dari wawancara tersebut adalah:

1. Penekanan pada keterampilan administratif dan pengetahuan hukum

Banyak perangkat desa, khususnya mereka yang berperan sebagai sekretaris desa, menekankan pentingnya memiliki pengetahuan yang kuat tentang hukum dan peraturan desa, serta

keterampilan administratif yang baik, termasuk pengelolaan dokumen, anggaran, dan laporan keuangan.

2. Pemanfaatan teknologi
Beberapa responden menyatakan bahwa mereka menggunakan teknologi, seperti komputer, dalam tugas-tugas administrasi, menunjukkan kesadaran akan pentingnya mengikuti kemajuan teknologi.
3. Kebutuhan peningkatan komunikasi dengan warga
Terdapat kritik dari warga terhadap perangkat desa yang dianggap kurang efektif dalam berkomunikasi dan memahami kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan perlunya peningkatan keterampilan komunikasi dan pendekatan yang lebih berorientasi pada warga.
4. Varian dalam profesionalisme
Ada perbedaan pendapat mengenai tingkat profesionalisme perangkat desa. Beberapa warga memandang perangkat desa mereka sebagai profesional dan mampu dalam melaksanakan tugas, sementara yang lain merasa ada kekurangan dalam aspek ini.
5. Keterlibatan dalam kehidupan sosial dan adat
Beberapa warga merasa bahwa perangkat desa kurang terlibat dalam kegiatan sosial dan adat di desa, yang mengindikasikan perlunya perangkat desa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan desa, bukan hanya tugas administratif.
6. Perluasan pelatihan dan pengembangan
Terdapat saran dari beberapa warga bahwa perangkat desa memerlukan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kinerja mereka, terutama dalam aspek kedisiplinan, efisiensi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari kesimpulan di atas, terlihat bahwa meskipun ada upaya yang dilakukan oleh perangkat desa dalam peningkatan pelayanan publik melalui keterampilan administratif dan pengetahuan hukum, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam aspek komunikasi, keterlibatan sosial, dan pemahaman kebutuhan masyarakat. Peningkatan pelatihan dan pengembangan keterampilan juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Peningkatan kinerja aparatur desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan, yang merupakan kunci dalam menentukan kemajuan desa (Atika et al., 2018; Fajarwati, 2019). Sejalan dengan itu, Taufiq et al. (2021) mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif oleh aparatur desa sangat penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan kualitas layanan dasar di desa. Dalam konteks yang serupa, Zubair et al. (2020) menyoroti bahwa peningkatan kompetensi komunikasi publik untuk staf desa, seperti yang dilakukan di Desa Cikeruh, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang komunikasi dan penggunaan media komunikasi. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan reputasi dan citra pemerintahan desa. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan dalam keterampilan administratif dan hukum, bersama dengan peningkatan kompetensi komunikasi dan keterlibatan sosial, adalah kunci dalam upaya peningkatan pelayanan publik di desa.

b. Kendala yang Dihadapi dalam Memberikan Pelayanan Publik

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden, kendala yang dihadapi oleh perangkat desa dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dapat dirangkum sebagai berikut:

[#R²] menyoroti berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya finansial dan tenaga kerja, keterbatasan akses ke teknologi informasi, birokrasi yang kompleks, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam akses pelayanan, serta kurangnya pemahaman tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Beliau juga menekankan masalah seperti partisipasi rendah masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. [#R¹²: AB Zebua, Warga Desa Hilibowo Kare] mengungkapkan bahwa perangkat desa di desanya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan publik. Beliau menyatakan bahwa perangkat desa sering memberikan tanggapan umum tanpa rincian yang jelas dan warga desa tidak memiliki informasi yang cukup

tentang pekerjaan perangkat desa, yang menyebabkan kurangnya tanggapan informatif dari warga.

[#R¹] mengidentifikasi masalah seringnya pemadaman listrik yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses surat-menyurat. Hal ini berdampak pada persepsi negatif masyarakat yang menganggap perangkat desa sengaja mempersulit. [#R⁶] menekankan kendala seperti akses jalan yang belum merata dan kondisi jalan yang rusak. Beliau juga mencatat bahwa infrastruktur yang kurang memadai, seperti jaringan internet yang lemah, menjadi penghambat dalam memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden tentang kendala yang dihadapi oleh perangkat desa dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya
Terdapat keterbatasan sumber daya finansial dan tenaga kerja yang memengaruhi kemampuan perangkat desa untuk menyediakan pelayanan yang memadai. Ini termasuk keterbatasan dalam pelatihan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara efektif.
2. Akses terbatas ke teknologi informasi
Desa-desa, khususnya yang terpencil, sering menghadapi tantangan dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan publik.
3. Birokrasi yang kompleks
Proses perizinan yang rumit dan birokrasi yang lambat menjadi hambatan serius, mengakibatkan penyelesaian masalah menjadi lebih lama dan menyulitkan.
4. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi
Beberapa kelompok masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik, yang dapat disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi.
5. Rendahnya partisipasi masyarakat
Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dapat menyebabkan pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.
6. Kurangnya pemahaman hukum dan peraturan
Beberapa perangkat desa mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum dan peraturan yang mengatur pelayanan publik, yang dapat berakibat pada ketidakpatuhan atau pelanggaran.
7. Infrastruktur fisik yang kurang memadai
Masalah seperti pemadaman listrik dan akses jalan yang belum merata atau rusak menjadi kendala fisik yang signifikan dalam menyediakan pelayanan publik yang efisien.
8. Kurangnya komunikasi dan informasi
Terdapat gap dalam komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat, di mana perangkat desa sering memberikan tanggapan umum tanpa rincian yang jelas dan warga desa merasa tidak memiliki informasi yang cukup tentang pekerjaan dan tanggung jawab perangkat desa.

Dari kesimpulan ini, terlihat bahwa perangkat desa menghadapi berbagai kendala dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mulai dari keterbatasan sumber daya, tantangan infrastruktur, hingga isu-isu terkait birokrasi dan partisipasi masyarakat. Solusi yang komprehensif dan terkoordinasi diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini. Studi dari Nugraha (2019) tentang birokrasi di desa menyoroti pentingnya sumber daya manusia yang kompeten dan memahami sistem birokrasi. Sistem birokrasi di tingkat desa idealnya berbasis merit untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, namun tantangan dalam mewujudkan birokrasi yang meritokratis sering terhambat oleh variasi dalam mekanisme pengisian jabatan perangkat desa. Nasution (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa desa, khususnya yang terpencil, sering menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi. Kesenjangan SDM antara wilayah perkotaan dan pedesaan merupakan salah satu hambatan utama dalam penerapan teknologi ini.

Terkait dengan keterbatasan sumber daya, Eryana (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa desa sering kali mengalami keterbatasan dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya

manusia. Kekurangan ini terutama terlihat dalam pelatihan dan keterampilan yang dibutuhkan perangkat desa untuk menjalankan tugas mereka secara efektif, memengaruhi kinerja mereka dalam pelayanan publik. Rosidin (2019) dalam hasil penelitiannya menekankan bahwa peran aktif masyarakat dalam pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka adalah penting untuk memastikan kepatuhan dan pemahaman hukum yang adekuat di kalangan perangkat desa.

c. Pelatihan yang Diperlukan oleh Perangkat Desa untuk Meningkatkan Kapasitas

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2023, [R#⁶], menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi perangkat desa untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Beliau menyebutkan bahwa ada berbagai kebutuhan pelatihan yang esensial untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa. Ini termasuk manajemen administrasi desa yang mencakup pengelolaan data, dokumentasi, dan pelaporan, pemahaman tentang hukum dan peraturan yang berlaku di tingkat desa seperti UU Desa, serta pelatihan dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu, [R#⁶] juga menyoroti pentingnya pelatihan dalam pengembangan masyarakat, yang mencakup cara menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa, komunikasi yang efektif, dan pengelolaan konflik. Kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengelola data dan administrasi desa juga dianggap penting, bersama dengan keterampilan komunikasi untuk berinteraksi efektif dengan masyarakat desa dan pihak terkait lainnya. Pelatihan dalam pengelolaan proyek juga dianggap penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek-proyek pembangunan desa dengan efisien.

[R#⁶], juga menekankan pentingnya pelatihan tentang pemberdayaan perempuan dan pemuda, pengelolaan lingkungan, pengetahuan tentang kesehatan dan sanitasi, serta pelatihan dalam penanggulangan bencana. Kemampuan berbahasa, pemahaman etika dan kode etik, pengembangan kepemimpinan, serta pengukuran kinerja dan evaluasi juga dianggap sebagai area pelatihan penting untuk perangkat desa. Sementara itu, [R#¹¹], seorang warga Desa Mazingo, menyatakan bahwa pelatihan untuk perangkat desa harus benar-benar dibutuhkan dan mendesak. Beliau menambahkan bahwa pelatihan harus diikuti dengan tindak lanjut yang memastikan perangkat desa memberikan pelayanan yang lebih baik. [R#¹¹] menyebutkan bahwa di desanya, baru terlaksana tiga jenis pelatihan untuk perangkat desa, yaitu sistem keuangan desa, pengelolaan aset desa, dan pelatihan profil desa. Namun, menurut beliau pelatihan untuk perangkat desa seharusnya tidak terbatas pada area-area tersebut saja, mengingat kinerja perangkat desa yang masih perlu ditingkatkan. Kedua perspektif ini menyoroti betapa pentingnya pelatihan dan pengembangan bagi perangkat desa dalam meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat desa.

Kesimpulan dari wawancara mengenai kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat desa di Kecamatan Alasa Talumuzoi adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya pelatihan berkelanjutan. Kedua narasumber menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan bagi perangkat desa. Pelatihan ini dianggap krusial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik di tingkat desa.
2. Area pelatihan yang dibutuhkan. Responden mengidentifikasi berbagai area pelatihan yang penting bagi perangkat desa, termasuk manajemen administrasi desa, pemahaman hukum dan peraturan, pengelolaan keuangan desa yang transparan, pengembangan masyarakat, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, keterampilan komunikasi, pengelolaan proyek, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pengelolaan lingkungan, kesehatan dan

- sanitasi, penanggulangan bencana, kemampuan berbahasa, etika dan kode etik, pengembangan kepemimpinan, serta pengukuran kinerja dan evaluasi.
3. Penerapan dan efektivitas pelatihan. Responden menyoroti bahwa pelatihan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak atau urgen dan harus ada tindak lanjut yang efektif. Beliau mengungkapkan bahwa hanya beberapa jenis pelatihan yang telah terlaksana di Desa Mazingo, menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas dan meningkatkan pelatihan bagi perangkat desa.
 4. Kinerja perangkat desa. Responden juga mengamati bahwa meskipun telah ada beberapa pelatihan, kinerja perangkat desa masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas pelatihan yang telah dilakukan dan identifikasi area yang memerlukan peningkatan.

Temuan dari berbagai penelitian sebelumnya menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pemerintahan desa. Kapasitas pemerintahan desa, yang mencakup efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, sangat bergantung pada pelatihan berkelanjutan. Atika et al. (2018) dalam kesimpulannya menegaskan bahwa pelatihan ini penting untuk memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan mengutamakan partisipasi masyarakat. Dalam konteks area pelatihan yang dibutuhkan, beberapa studi, seperti oleh Wisnumurti et al. (2022) dan Praseptiawan et al. (2021), mengidentifikasi berbagai area penting untuk perangkat desa. Ini termasuk tata kelola keuangan desa, yang bertujuan memberikan pemahaman tentang alur penganggaran, perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, pelatihan dan pendampingan juga diperlukan dalam konteks pengembangan desa wisata dan penggunaan sistem informasi desa dengan platform OpenSID untuk meningkatkan literasi digital perangkat desa.

Efektivitas pelatihan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan mendesak atau urgen, dan harus ada tindak lanjut yang efektif, seperti yang diungkapkan dalam penelitian di Desa Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat oleh Muliadin et al. (2018). Pelatihan yang dilakukan telah berkontribusi pada kemampuan aparatur desa dalam perencanaan pembangunan, pengarahan kepada bawahan atau masyarakat, dan pengambilan keputusan yang efektif. Meskipun telah ada beberapa pelatihan, kinerja perangkat desa masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas pelatihan yang telah dilakukan, sebagaimana ditekankan oleh Kominfo (2020). Mereka menyarankan peningkatan kapasitas SDM desa melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan literasi digital untuk mendukung prinsip pembangunan desa.

- d. Pelatihan dan Pengembangan Perangkat Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa

Dalam rangkaian wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2023 untuk memahami pentingnya pelatihan dan pengembangan perangkat desa dalam meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa di Kecamatan Alasa Talumuzoi, peneliti berbicara dengan dua individu yang memberikan perspektif berbeda.

Pertama, [#R⁵] menyatakan keyakinannya bahwa pelatihan dan pengembangan perangkat desa merupakan upaya penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa pelatihan dan pengembangan ini membantu perangkat desa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Menurutnya, pelatihan ini memungkinkan perangkat desa untuk mengotomatiskan beberapa tugas administratif dan proses pelaporan, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi operasional pemerintah desa dan menghemat waktu serta sumber daya.

Di sisi lain, [#R¹⁰] mengungkapkan kekhawatiran terkait kurangnya informasi yang tersedia bagi warga desa mengenai program pelatihan dan pengembangan perangkat desa. Dia menyatakan bahwa ketiadaan informasi yang memadai

tentang program pelatihan dapat menyebabkan persepsi bahwa pelatihan yang diselenggarakan tidak bermutu dan tidak memberikan manfaat yang cukup bagi warga desa. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa pelatihan yang kurang efektif dapat meningkatkan ketidakpuasan di kalangan warga, yang merasa tidak melihat hubungan yang jelas antara pelatihan dan pengembangan perangkat desa dengan peningkatan kualitas pelayanan publik atau pemenuhan kebutuhan mereka.

Kedua perspektif ini menyoroti pentingnya pelatihan dan pengembangan perangkat desa dalam meningkatkan pelayanan publik, sekaligus menggarisbawahi kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi tentang program-program tersebut disampaikan dengan efektif kepada masyarakat, agar mereka dapat memahami dan merasakan manfaat langsung dari upaya peningkatan kinerja perangkat desa.

Kesimpulan dari wawancara ini menyoroti pentingnya pelatihan dan pengembangan bagi perangkat desa dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, terdapat kebutuhan yang jelas untuk peningkatan komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang kegiatan dan manfaat dari program pelatihan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan merasakan dampak positif dari upaya peningkatan kinerja perangkat desa dalam pelayanan publik. Keselarasan antara kegiatan pelatihan dan persepsi serta kebutuhan masyarakat merupakan aspek krusial dalam proses ini.

Pelatihan dan pengembangan bagi perangkat desa esensial untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka dalam melayani masyarakat. Menurut literatur di bidang administrasi publik, pelatihan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan (Berman et al., 2021). Pelatihan juga berkontribusi pada peningkatan inovasi dan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan masyarakat (Pynes, 2013). Efektivitas program pelatihan tergantung pada seberapa baik informasi tentang program ini dikomunikasikan kepada masyarakat. Komunikasi yang baik dapat membangun kepercayaan dan memastikan transparansi (Grindle, M. S. dalam Jayadiputera et al. (2023).

Penyampaian informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang kegiatan dan manfaat pelatihan membantu masyarakat memahami dan merasakan dampaknya. Ini sejalan dengan teori komunikasi dalam administrasi publik yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2015). Keselarasan antara kegiatan pelatihan dan kebutuhan masyarakat adalah kunci untuk mencapai hasil yang efektif. Hal ini menuntut pendekatan yang berpusat pada masyarakat, di mana aspirasi dan kebutuhan mereka menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan (Bovaird & Loeffler, 2023). Literatur di bidang pengembangan masyarakat dan administrasi publik menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam merancang dan mengimplementasikan program pelatihan, memastikan bahwa mereka sesuai dengan konteks lokal dan spesifik kebutuhan masyarakat (Putnam, 2020).

KESIMPULAN

Pertama, terdapat kebutuhan mendesak untuk pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan bagi perangkat desa, terutama dalam meningkatkan keterampilan administratif, pengetahuan hukum, dan penggunaan teknologi informasi. Area pelatihan yang dibutuhkan mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen administratif hingga pengembangan masyarakat dan keterampilan komunikasi. Kedua, penelitian menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya finansial dan tenaga kerja di desa, serta akses yang terbatas ke teknologi, yang menjadi hambatan dalam penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien. Ketiga, terdapat kompleksitas dalam birokrasi di tingkat desa yang mempengaruhi efektivitas perangkat desa. Selain itu, penelitian juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dan kurangnya pemahaman hukum oleh beberapa perangkat desa. Terakhir, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat untuk memastikan masyarakat memahami dan merasakan dampak dari upaya peningkatan kinerja perangkat desa. Kesimpulan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik dalam peningkatan pelayanan publik di desa yang mencakup pelatihan perangkat desa, peningkatan sumber daya, teknologi, serta keterlibatan dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini menunjukkan beberapa keterbatasan signifikan. Pertama, ada kesulitan dalam mengakses data spesifik terkait dengan isu-isu kunci seperti keterbatasan sumber daya finansial dan tenaga kerja di desa, infrastruktur fisik, serta aspek komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat. Kedua, penelitian belum sepenuhnya menggali dampak jangka panjang dari pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada perangkat desa, yang penting untuk menilai efektivitasnya dalam meningkatkan pelayanan publik. Ketiga, ada potensi bias dalam perspektif responden, yang bisa mempengaruhi objektivitas kesimpulan. Mengatasi keterbatasan ini dalam penelitian selanjutnya akan membantu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif tentang cara meningkatkan pelayanan publik di desa.

IMPLIKASI PENELITIAN

1. Pengembangan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal
Program pelatihan untuk perangkat desa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik setiap desa. Ini melibatkan analisis mendalam tentang tantangan lokal, seperti keterbatasan sumber daya, akses terbatas ke teknologi, dan kebutuhan spesifik masyarakat desa. Program pelatihan yang efektif harus mencakup berbagai topik, mulai dari manajemen administratif, hukum, dan keuangan, hingga keterampilan komunikasi dan pengelolaan proyek.
2. Peningkatan akses dan keterlibatan teknologi
Mengingat pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam mengatasi kesenjangan dan mempercepat pembangunan desa, desa perlu mengintegrasikan teknologi secara lebih luas dalam operasional mereka. Pelatihan dalam penggunaan teknologi ini perlu menjadi bagian penting dari program pengembangan kapasitas perangkat desa.
3. Pemahaman dan implementasi prinsip tata kelola yang baik
Pelatihan harus mencakup aspek tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Ini akan membantu meningkatkan kinerja perangkat desa dan membangun kepercayaan di kalangan masyarakat.
4. Penguatan komunikasi dan informasi dengan masyarakat
Efektivitas pelatihan tidak hanya terletak pada peningkatan keterampilan perangkat desa, tetapi juga dalam penyampaian informasi dan hasil pelatihan kepada masyarakat. Perangkat desa harus dilengkapi dengan keterampilan komunikasi yang baik untuk membangun dialog yang lebih efektif dengan masyarakat.
5. Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan
Pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap program pelatihan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif. Hal ini termasuk penilaian kebutuhan yang berubah, umpan balik dari peserta pelatihan, dan penyesuaian program untuk memenuhi tantangan baru.
6. Keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan
Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan dan pembentukan kebijakan di desa. Ini memungkinkan pelatihan dan strategi yang lebih berfokus pada masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas program pembangunan.
7. Mendukung infrastruktur dan sumber daya yang memadai
Pemerintah dan pihak terkait harus berinvestasi dalam infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung inisiatif pelatihan dan pembangunan di desa, termasuk akses yang lebih baik ke teknologi dan sumber daya keuangan.

Implementasi dari implikasi-implikasi ini akan membutuhkan kerjasama antara perangkat desa, masyarakat, pemerintah lokal dan nasional, serta lembaga pembangunan, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di desa.

REFERENSI

- Aradiansyah, D., Harsani, P., Tosida, E. T., Saputra, A. O., & Bhayangkari, A. (2022). Development of a Village Information System for Acceleration of Village Services in Desa Tegal Kecamatan Kemang Bogor. *JISA(Jurnal Informatika Dan Sains)*, 5(1), 54–57. <https://doi.org/10.31326/jisa.v5i1.1113>
- Atika, N., Ati, N. U., & Hayat. (2018). Peningkatan Kinerja Aparatur Desa dalam Melaksanakan Tugas Administrasi Desa Melalui Pendidikan dan Pelatihan. *Civil Service*, 12(1), 33–39.

- <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/22>
- Berman, E. M., Bowman, J. S., West, J. P., & Wart, M. R. Van. (2021). *Human Resource Management in Public Service: Paradoxes, Processes, and Problems*. CQ Press.
- Bernard, H. R. (2017). *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (6th ed.). Rowman & Littlefield.
- Bovaird, T., & Loeffler, E. (2023). *Public Management and Governance*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003282839>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). Routledge.
- Dessler, G. (2020). *Human Resource Management* (16th ed.). Pearson Education.
- Eryana, E. (2018). Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 89–95. <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iptishaduna/article/view/125>
- Fajarwati, N. (2019). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22(2). <https://doi.org/10.31845/jwk.v22i1.165>
- Handoko, T. H. (2017). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Gadjah Mada University Press.
- Jayadiputera, T. E. A., Sumartono, S., Nuh, M., & Sujarwoto, S. (2023). Good Enough Governance For Poverty Alleviation Program In Village (A Case Study of Nanga Pamolontian Village). *Journal of Public Administration Studies*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2023.008.01.1>
- Kominfo. (2020). *Bangun Desa Digital, Tingkatkan Kapasitas SDM di Bidang TI*. KOMINFO. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/30641/bangun-desa-digital-tingkatkan-kapasitas-sdm-di-bidang-ti/0/berita#:~:text=Prinsip pembangunan desa harus menjadikan,Desa Digital 2020 di](https://www.kominfo.go.id/content/detail/30641/bangun-desa-digital-tingkatkan-kapasitas-sdm-di-bidang-ti/0/berita#:~:text=Prinsip%20pembangunan%20desa%20harus%20menjadikan,Desa%20Digital%202020%20di)
- Lase, D. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia. In M. Silalahi (Ed.), *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (pp. 125–150). Future Science.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2015). *Designing Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muliadin, M., Maemunah, M., & Candra, C. (2018). Implementasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 10. <https://doi.org/10.31764/civicus.v5i2.431>
- Nasution, R. D. (2016). TANTANGAN DESA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 20(1), 31–43. <https://doi.org/10.33299/jpkop.20.1.525>
- Nugraha, M. S. (2019). TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN MERITOKRASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DESA. *GEMA PUBLICA*, 4(2), 54–64. <https://doi.org/10.14710/gp.4.2.2019.54-64>
- Oldy Arnoldy, Johannes, Edward, & Shofia Amin. (2021). WHY SHOULD PUBLIC SERVICE MOTIVATION IMPORTANT FOR VILLAGEDVELOPMENT. *International Journal of Social Science*, 1(4), 373–384. <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i4.715>
- Prabawati, I., Pradana, G. W., Ma'ruf, M. F., Kurniawan, B., Eprilianto, D. F., & Tolentino, T. de A. (2023). The Development of Village Data and Information Management through the Innovation Diffusion. *The Journal of Society and Media*, 6(2), 566–590. <https://doi.org/10.26740/jsm.v6n2.p566-590>
- Praseptiawan, M., Nugroho, E. D., & Iqbal, A. (2021). Pelatihan Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Perangkat Desa Taman Sari. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 521–528. <https://doi.org/10.35568/abdimas.v4i1.1206>
- Putnam, R. D. (2020). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (Revised an). Simon & Schuster.
- Putra, A. I., Nugroho, S. A., Restuhadi, F., Sandhyavitri, A., Febrizal, F., & Rosma, I. H. (2023). The community participation on infrastructures and facilities updating data of Teratak Village, Rumbio

- Jaya. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 8(1), 113–131. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v1i1.8688>
- Pynes, J. E. (2013). *Human Resources Management for Public and Nonprofit Organizations: A Strategic Approach* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Rasaili, W. (2022). Operator Competence and Management of the Village Financial System: A Study on the Use of Siskeudes in Sumenep District. *Neo Journal of Economy and Social Humanities*, 1(2), 110–118. <https://doi.org/10.56403/nejesh.v1i2.10>
- Rosidin, U. (2019). ARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG ASPIRATIF. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 168–184. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/72>
- Saidi, A., & Habibi, M. (2022). Descriptive Analysis of Human Resource Development Through Motivation and Training as Well As Supporting and Inhibiting Factors. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(4), 549–558. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1107>
- Suharso, A., Manda, G. S., Rozikin, C., & Mayasari, M. (2022). Training and assistance on the use of village administration management system using OpenSID in Sukatani Village. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 7(4), 779–788. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v7i4.8290>
- Taufiq, T., Maldun, S., & Nurkaidah, N. (2021). KOMUNIKASI APARATUR DESA TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DESA SE-KECAMATAN TELLULIMPOE DI KABUPATEN BONE. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 2(2), 67–73. <https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.566>
- Waruwu, E., Waruwu, S., Ndraha, A. B., Telaumbanua, A., Lase, D., Halawa, F., Bate'e, M. M., Waruwu, M. H., Mendrofa, S. A., Laoli, A., Halawa, O., & Gea, M. (2023). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (M. Silalahi (ed.)). Future Science.
- Werner, J. M., & DeSimone, R. L. (2012). *Human Resource Development* (6th ed.). Cengage Learning.
- Wicaksana, F. G., Trihatmoko, R. A., Suhardjanto, D., & Murtini, H. (2019). The Regulation on Village Governance in Indonesia: Efficient Contracting in Agency Theory. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(2), 110. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i2.14812>
- Wijayanti, R., & Taufik, N. I. (2022). The Role of Village Funds to Improve Community Welfare: A Study in West Bandung Regency. *IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 5(1), 155–163. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i1.1641>
- Wisnumurti, A. A. G. O., Antarini, L., Mardika, I. M., & Dewi, I. G. A. A. Y. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Tata Kelola Pengembangan Desa Wisata Kepada Perangkat Desa dan Pokdarwis. *International Journal of Community Service Learning*, 6(3), 293–298. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v6i3.51586>
- Zubair, F., Kadarisman, A., & Dewi, R. (2020). Peningkatan Kompetensi Komunikasi Publik Aparatur Desa dalam Membangun dan Mengokohkan Reputasi Pemerintahan Desa. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pegabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 62–68. <https://doi.org/10.32509/am.v3i2.1021>